

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-Alun No 2 Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
Telp./Fax (0265) 2641721 Email: humaspangandaran@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT dengan diselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari tiap Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah. Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan program dan kegiatan 9 (Sembilan) bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran selama satu tahun anggaran.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan penganggaran tahun berikutnya dilaksanakan pada awal tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja ini akan disesuaikan kembali berdasarkan pagu indikatif anggaran yang ditetapkan bagi masing-masing Bagian sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Kami menyadari bahwa hasil dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Kami berharap dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efisiensi dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pangandaran, 27 Juli 2019

Sekretaris Daerah
Kabupaten Pangandaran



Drs. H. KUSDIANA, MM
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 19670423 198603 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 dan Capaian Renstra 2016-2021	8
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	Error! Bookmark not defined.
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	36
3.3 Program dan Kegiatan.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	49
BAB V PENUTUP	
Tabel 2.2	60
Tabel T-C.33	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Rensta OPD dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun

Anggaran Belanja Penempatan Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi tiap Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
15. Peraturan Bupati Pangandaran No. 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2017;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021;

2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a) BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

b) BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

c) BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

d) BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

e) BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun rencana.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana program dan kegiatan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja SKPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan program dan kegiatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 dan Capaian Renstra 2016-2021

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Selatan pada tahun 2019 telah melaksanakan 16 program dan 96 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - a. Penyelesaian Konflik Pertanahan
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD
 - b. Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah
 - c. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ Paten
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

- a. Pelantikan Kepala Desa Serentak Kabupaten
 - b. Penyediaan Operasional KDH
 - c. Optimalisasi Peningkatan Usaha Ekonomi Daerah
 - d. Optimalisasi Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah
 - e. Pembinaan Peningkatan Promosi Produk Unggulan Daerah
 - f. Penyusunan Raperda Pendirian PD BPR BPKD Pangandaran dan Cijulang
 - g. Penyusunan Raperda Pendirian PDAM
 - h. Penyusunan Raperda Penyertaan Modal PD BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang) dan PDAM
 - i. Pendampingan Pendirian dan Pengelolaan PD BPR BKPD dan PDAM
 - j. Optimalisasi Pengembangan Pariwisata
 - k. Optimalisasi Tim Monitoring dan Evaluasi BUMD, BUMDes/ Lembaga Keuangan Mikro
 - l. Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Hibah Keagamaan
 - m. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - n. Amaliah Ramadhan
 - o. Pelepasan, Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji
 - p. Pekan Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat Kabupaten
 - q. Pekan Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat Provinsi
 - r. Pelayanan Keagamaan
 - s. Pembinaan dan Penanggulangan Masalah Sosial Budaya
 - t. Silaturahmi Alim Ulama Se-Kabupaten Pangandaran
 - u. Pembinaan Lembaga Organisasi Keagamaan
 - v. Pembinaan Organisasi Kepemudaan Islam
 - w. Pembinaan Peserta LPTQ Kecamatan Dan Kabupaten
 - x. STQ/MTQ Tingkat Kabupaten
 - y. STQ/MTQ Tingkat Provinsi
 - z. Pelayanan Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/WKDH
 - aa. Pelayanan Upacara PHBN
 - bb. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah
 - cc. Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Pangandaran
4. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- a. Desk Pilkada Kabupaten Pangandaran
 - b. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - c. Bimbingan Teknis Pelayan Prima bagi Aparatus Negara Sipil
 - d. Perumusan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal

5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - a. Peningkatan Kerja Sama Daerah
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
7. Program Ran Ham
 - a. Rencana Aksi Nasional
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
 - i. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - o. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - p. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - q. Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c. Pengadaan Mebeleur
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - k. Pengadaan Komputer

- m. Penyediaan Tanah
- 10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan Teknis Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
 - b. Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
- 12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - c. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
 - d. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
 - f. Penyusunan LAKIP
- 13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Pengendalian Pembangunan
 - b. Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - d. Penyusunan Standar Satuan Harga
- 14. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
- 15. Program Perencanaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - a. Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
 - b. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 16. Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah
 - a. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - b. Penyusunan Dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
 - c. Perumusan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal
 - d. Inventarisasi Dan Perumusan Standar Operating Prosedur
 - e. Pedoman dan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Pangandaran
- f. Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan
 - g. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
 - h. Fasilitasi Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah

Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis berdasarkan capaian sasaran sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD	Jumlah Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	SKJ	100	100	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Perda Penataan Kelembagaan OPD	Perda	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Penerapan SPM	Urusan	6	6	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Inventarisasi dan Fasilitasi Data LHKPN dan PS LP2P	Dokumen	5	5	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja pada setiap jabatan	OPD	23	23	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Dokumen LAKIP yang Baik	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Kebijakan Program KDH / Kegiatan SKPD	Dokumen	5	3	60	Cukup Berhasil
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana	%	100	95	95	Sangat Berhasil
		Jumlah Data Pelaksanaan Pembangunan Fisik	%	100	95	95	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD	Dokumen	3	3	100	Sangat Berhasil

		Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Kecamatan	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Laporan Perkembangan Daerah Otonomi Baru	Dokumen	2	2	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kecamatan yang telah Menerapkan Aplikasi PATEN	Kecamatan	6	6	100	Sangat Berhasil
5	Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH	Jumlah lembaga yang Layak mendapatkan Hibah	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Amaliah Ramadhan	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Kabupaten	Kecamatan	10	1	10	Kurang Berhasil
		Jumlah Kegiatan PAI SD Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan	Kegiatan	20	20	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Calon Jemaah Haji	Orang	450	386	85.78	Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jenis	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pembinaan menanggulangi masalah Sosial Budaya	Kegiatan	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan Islam	Kegiatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Silaturahmi Alim Ulama di Kabupaten Pangandaran	Lembaga	15	15	100	Sangat Berhasil

		Jumlah Pembinaan LPTQ	Kecamatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Kecamatan dan Kabupaten					
		Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	Kecamatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan STQ/MTQ Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unggulan/ Dekranasda	Kegiatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pembinaan Ritel Tradisional/ PKL	Kecamatan	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Kecamatan	10	10	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Destinasi Wisata yang termonitoring dan terevaluasi	Ow	5	5	100	Sangat Berhasil
		Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam peningkatan modal usaha	Kecamatan	10	10	100.00	Sangat Berhasil
6	Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah	Jumlah Penyelesaian Kasus Peratanahan	Kasus	4	4	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pertanahan	Kegiatan	1	1	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Permasalahan Perbatasan antar Pemerintah Daerah	Kasus	2	2	100	Sangat Berhasil
7	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di Koordinasikan	Kasus	30	26	86.67	Berhasil
		Jumlah Pendampingan Perkara	Kasus	4	4	100	Sangat Berhasil

		Jumlah Legalisasi Rancangan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa	Buku	67	67	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Produk Hukum	63	63	100.00	Sangat Berhasil
		Jumlah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Produk Hukum	63	62	98.41	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di Unggah Melalui Website	Produk Hukum	63	63	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Peserta Pembinaan Sadar Hukum	Desa	93	93	100	Sangat Berhasil
8	Terjalannya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	Kegiatan	4	4	100	Sangat Berhasil
9	Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Data Progres Realisasi Anggaran Kabupaten	Dokumen	12	12	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Data Realisasi Fisik Kegiatan	Persen	100	95	95	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya	Dokumen	2	2	100	Sangat Berhasil
10	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pangandaran	Dokumen	15	15	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya	Dokumen	18	18	100	Sangat Berhasil

		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kontruksi	Dokumen	105	105	100	Sangat Berhasil
		Jumlah Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
11	Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat	Jumlah Rencana Aksi Nasional HAM	OPD	34	34	100	Sangat Berhasil

2.1.1. Rencana Anggaran Sekretariat daerah Kabupaten Pangandaran

Pada Tahun Anggaran 2019, anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 12,266,055,923,- sedangkan untuk kegiatan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 20,549,902,100,- Sehingga total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 32,815,958,023,- Secara terinci terlihat pada tabel berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,266,055,923.00
	Gaji/Tunjangan	12,266,055,923.00
	BELANJA LANGSUNG	20,549,902,100.00
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	138,900,000.00
	Penyelesaian Konflik Pertanahan	138,900,000.00
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,039,777,500.00
	Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD	274,277,500.00
	Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah	742,800,000.00
	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ Paten	22,700,000.00
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	8,850,311,800.00
	Pelantikan Kepala Desa Serentak Kabupaten	15,000,000.00
	Penyediaan Operasional KDH	1,731,933,500.00
	Optimalisasi Peningkatan Usaha Ekonomi Daerah	24,350,000.00
	Optimalisasi Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah	37,100,000.00

	Pembinaan Peningkatan Promosi Produk Unggulan Daerah	43,202,000.00
	Penyusunan Raperda Pendirian PD BPR BPKD Pangandaran dan Cijulang	50,000,000.00
	Penyusunan Raperda Pendirian PDAM	50,000,000.00
	Penyusunan Raperda Penyertaan Modal PD BPR BKPD(Pangandaran dan Cijulang) dan PDAM	50,000,000.00
	Pendampingan Pendirian dan Pengelolaan PD BPR BKPD dan PDAM	300,000,000.00
	Optimalisasi Pengembangan Pariwisata	32,390,000.00
	Optimalisasi Tim Monitoring dan Evaluasi BUMD, BUMDes/ Lembaga Keuangan Mikro	23,850,000.00
	Verifikasi, Momitoring, Evaluasi dan Laporan Hibah Keagamaan	120,600,000.00
	Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	274,600,000.00
	Amaliah Ramadhan	60,000,000.00
	Pelepasan, Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	500,000,000.00
	Pekan Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat Kabupaten	124,250,000.00
	Pekan Kreatifitas Seni PAI SD Tingkat Provinsi	136,350,000.00
	Pelayanan Keagamaan	1,035,928,000.00
	Pembinaan dan Penanggulangan Masalah Sosial Budaya	354,400,000.00
	Silaturahmi Alim Ulama Se-Kabupaten Pangandaran	163,000,000.00
	Pembinaan Lembaga Organisasi Keagamaan	1,797,000,000.00
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan Islam	76,000,000.00
	Pembinaan Peserta LPTQ Kecamatan Dan Kabupaten	41,975,000.00
	STQ/MTQ Tingkat Kabupaten	196,545,500.00
	STQ/MTQ Tingkat Provinsi	188,699,000.00
	Pelayanan Kunjungan Kerja/Inspeksi KDH/WKDH	191,000,000.00
	Pelayanan Upacara PHBN	81,550,000.00
	Penyebearluasan Informasi Kegiatan Pimpinan Daerah	1,074,939,800.00
	Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Pangandaran	75,649,000.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	520,000,000.00
	Desk Pilkada Kabupaten Pangandaran	30,000,000.00
	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	225,000,000.00
	Bimbingan Teknis Pelayan Prima bagi Aparatus Negara Sipil	225,000,000.00
	Perumusan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal	40,000,000.00
5.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	33,750,000.00
	Peningkatan Kerja Sama Daerah	33,750,000.00
6.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	267,782,500.00
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	37,400,000.00
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	155,382,500.00
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000.00
	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	30,000,000.00
7.	Program Ran Ham	37,600,000.00

	Rencana Aksi Nasional	37,600,000.00
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,839,696,500.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44,000,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388,500,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,237,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	25,000,000.00
	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	487,800,000.00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	323,100,000.00
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	46,800,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	99,600,000.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200,179,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,218,500.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	194,600,000.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121,499,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	84,000,000.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,275,800,000.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	800,000,000.00
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi	312,600,000.00
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,807,127,500.00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	297,350,000.00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	48,937,500.00
	Pengadaan Mebeleur	109,690,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	45,000,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	147,000,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	557,300,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	334,150,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	30,000,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	30,000,000.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10,000,000.00
	Pengadaan Komputer	127,700,000.00
	Penyediaan Tanah	70,000,000.00
10.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	241,027,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	111,870,000.00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	129,157,000.00
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	434,110,000.00
	Bimbingan Teknis Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	217,055,000.00
	Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara	217,055,000.00
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	325,621,000.00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7,351,000.00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,280,000.00
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	27,350,000.00

	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	210,287,000.00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	63,900,000.00
	Penyusunan LAKIP	11,453,000.00
13.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	388,571,100.00
	Pengendalian Pembangunan	155,581,100.00
	Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran	156,378,000.00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan KDH	52,050,000.00
	Penyusunan Standar Satuan Harga	24,562,000.00
14.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	178,500,000.00
	Pengelolaan Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	178,500,000.00
15.	Program Perencanaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	144,900,000.00
	Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	20,900,000.00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	124,000,000.00
16.	Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah	302,227,200.00
	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	51,000,000.00
	Penyusunan Dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	7,600,000.00
	Inventarisasi Dan Perumusan Standar Operating Prosedur	25,000,000.00
	Pedoman dan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran	23,021,200.00
	Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan	50,000,000.00
	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	50,000,000.00
	Fasilitasi Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	95,606,000.00
JUMLAH TOTAL		32,815,958,023.00

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat Daerah

Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Pagu anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Selatan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 32,815,958,023,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12,226,055,923,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 20,549,902,100,- bila dilihat dari realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 12,201,089,364,- atau

sebesar 99,47 %. Sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung adalah sebesar Rp. 18.957.135.726,- atau sebesar 92,25 %, sehingga total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 31.158.225.090,- atau sebesar 94,95 %, kurangnya pencapaian realisasi keuangan disebabkan adanya Gaji dan tunjangan yang tidak terserap karena Tunjangan Kinerja Bulan Desember diberikan pada Bulan Januari tahun berikutnya sedangkan untuk belanja langsung adanya efisiensi pada kegiatan, hal ini menjadi acuan bagi para Pejabat pelaksana teknis kegiatan agar dapat membuat perencanaan lebih baik lagi.

Secara lebih rinci sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI		KET.
				FISIK	KEUANGAN	
I	SASARAN :Meningkatnya Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD					
1	Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah	252,227,200.00	239,386,336.00	100%	92%	Efisiensi
II	SASARAN :Meningkatnya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan					
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,039,777,500.00	1,014,980,977.00	100%	98%	Efisiensi
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	325,621,000.00	309,645,270.00	83%	95%	Efisiensi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155,581,100.00	153,568,900.00	100%	99%	Efisiensi
4	Program Peningkata Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	520,000,000.00	511,312,078.00	100%	98%	Efisiensi
III	SASARAN :Terpenuhinya Kegiatan KDH/WKDH					
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	15,000,000.00	14,250,000.00	100%	95%	Efisiensi

2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,731,933,500.00	1,438,561,253.00	100%	83%	
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	160,892,000.00	154,877,544.00	100%	93%	Efisiensi
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5,074,347,500.00	4,571,268,593.00	88%	95%	Efisiensi
5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,347,489,800.00	1,309,424,130.00	98%	94%	Efisiensi
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	75,649,000.00	74,208,050.00	100%	98%	Efisiensi
IV	SASARAN : Tersusunnya Kebijakan Umum Tentang Pedoman Untuk Pelaksanaan Pengembangan Tata Batas Wilayah					
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	138,900,000.00	135,838,453.00	100%	98%	Efisiensi
V	SASARAN : Tersedianya Produk Hukum Daerah					
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	267,782,500.00	245,535,200.00	128%	94%	Efisiensi
VI	SASARAN : Terjalinnya Kerjasama Pembangunan antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota					
1	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	33,750,000.00	33,641,219.00	100%	100%	
VII	SASARAN : Meningkatnya ketaatan atau kesesuaian pelaksanaan pembangunan					
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	232,990,000.00	231,786,150.00	100%	100%	Efisiensi
VIII	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik					
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	178,500,000.00	177,435,858.00	100%	99%	Efisiensi
2	Program Perencanaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	144,900,000.00	141,750,000.00	100%	95%	Efisiensi
IX	SASARAN : Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat					
1	Program Ran Ham	37,600,000.00	36,984,521.00	100%	98,36%	Efisiensi
X	SASARAN : Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran					

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,839,696,500.00	5,472,673,671.00	95%	92%	Efisiensi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,807,127,500.00	1,633,872,462.00	94%	90%	Efisiensi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	241,027,000.00	233,953,000.00	100%	97%	Efisiensi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	434,110,000	412,856,000	100%	95,10%	Efisiensi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	325.621.000	309.645.270	83.33%	78,76%	Efisiensi
6	Non Program / Gaji dan Tunjangan	12,266,055,923	12,201,089,364	100%	99,47%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- d. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah;

- e. pembinaan aparatur pemerintah daerah;
- f. penyelenggaraan tugas sekretariat daerah; dan
- g. pembinaan teknis administratif kepada inspektorat.

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan:
 - a. Belum optimalnya supporting data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan.
 - b. Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan:
 - a. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan. Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - b. Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. Eprocurement bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima:
 - a. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerinta han Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Plafon Anggaran Sementara		Sumber Dana
										Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							62,690,119,687	46,123,892,412			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							825,078,000	234,747,000			
2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPA							69,165,0	69,165,0			
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.							69,165,000	69,165,000			
2	10	04	2.01	1	Inventarisasi si Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota.	Jumlah Penyelesaian Kasus Peratanahan	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		1 Kasus		69,165,000	69,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT							99,713,000	99,713,000			
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota							99,713,000	99,713,000			
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen yang Disusun	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		1 Dokumen		99,713,000	99,713,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH							590,331,000	0			
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah							590,331,000	0			
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Desa Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pertanahan	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		44 Desa 1 Kegiatan		590,331,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							65,869,000	65,869,000			
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							65,869,000	65,869,000			
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pertanahan	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		1 Dokumen		65,869,000	65,869,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH			

01				SEKRETARIAT DAERAH							61,865,041,687	46,123,892,412		
01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							24,863,254,099	15,735,095,654		
01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							1,820,360,000	1,221,000,500		
01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang di Fasilitas, Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan n Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah, Jumlah Kecamatan yang telah Menerapkan Aplikasi PATEN, Jumlah Penerapan SPM, Jumlah Penyusunan LPPD, IKK, ILPPD dan EKPPD		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	7 Dokumen 12 Dokumen 4 Kecamatan 6 Urusan Bidang 2 Dokumen		1,820,360,000	1,221,000,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							22,321,262,899	13,792,463,954		
01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	250 lembaga		15,009,721,700	11,450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
01	02	2.03	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas KPA Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas TPUKS/M Jumlah kegiatan Pentas PAI tingkat Kabupaten Jumlah kegiatan Pentas PAI tingkat Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pendidikan) Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	6 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 300 Lembaga		1,154,973,900.00	825,027,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
01	02	2.03	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Calon Jemaah Haji Jumlah Kegiatan Amallah Ramadhan Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah organisasi kepemudaan islam yang dibina Jumlah organisasi Lembaga Keagamaan yang di bina Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan Jumlah Pembinaan LPTQ Kecamatan dan Kabupaten		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	500 Orang 10 Kegiatan 4 Jenis 10 Lembaga 16 Lembaga 20 Kegiatan 1 Kegiatan		6,156,567,299	1,517,436,454	PENDAPATAN ASLI DAERAH		

01	02	203		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah								636,491,000	636,491,000		
01	02	203	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Legalisasi Rancangan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah/desa	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		33 Buah			292,415,000	292,415,000		
01	02	203	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Pendampingan Perkara	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		3 Kasus			207,831,000	207,831,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Permasalahan Hukum	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		12 Dokumen Laporan						
						Jumlah Rencana Aksi Nasional HAM	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		37 OPD						
01	02	203	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di Unggah Melalui Website	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		63 Produk Hukum			136,245,000.00	136,245,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Publikasi Peraturan PerundangUndangan	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		321 Buku						
01	02	204		Fasilitasi Kerjasama Daerah								85,140,200	85,140,200		
01	02	204	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		7 Buah			85,140,200	85,140,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								4,904,707,200.00	1,723,842,700.00		
01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								1,240,153,700	608,134,700		
01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah pemantauan dan evaluasi pelestarian lingkungan hidup	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		10 Kecamatan			532,611,500	285,422,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes dan Lembaga Keuangan Mikro			4 Kecamatan						
01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah destinasi wisata yang termonitoring dan terevaluasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi		5 Objek Wisata			707,542,200	322,712,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah komoditas produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan			10 Kecamatan						
						Jumlah pelaku usaha (UMKM) yang terfasilitasi dalam pemasaran produk dengan perusahaan menengah dan besar			25 Pelaku Usaha						
						Jumlah pelaku usaha (UMKM) yang terfasilitasi dalam peningkatan modal usaha Pengendalian komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat			20 Pelaku Usaha						
						Pengendalian komoditas harga kebutuhan pokok masyarakat			10 Kecamatan						

01	03	202	Administrasi Pembangunan									2,945,153,500	423,803,000		
01	03	202	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan an dibandingk an dengan rencana		Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		12 Laporan		1,584,833,500	106,715,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Lingkup Setda				9 Dokumen					
						Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya				2 Dokumen					
						Jumlah Kebijakan Program KDH / Kegiatan SKPD				1 Dokumen					
01	03	202	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Data Pelaksanaan Pembangunan Fisik		Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		2 Dokumen		1,360,320,000	317,088,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Data Realisasi Fisik Kegiatan Realisasi Anggaran Kabupaten				12 Dokumen					
						Jumlah Dokumen Data Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kinerja Internal Sekretariat Daerah				1 Dokumen					
						Jumlah Dokumen Data Progres Realisasi Anggaran Kabupaten				12 Laporan					
01	03	2.03	Pengadaan Barang dan Jasa									719,400,000	691,905,000		
01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Kegiatan		719,400,000	691,905,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Kegiatan Pengelolaan LPSE				1 Paket					
						Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				145 Dokumen					
						Jumlah Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (Sirup)				1 Kegiatan					
01	04		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM									5,391,951,700.00	4,437,715,750.00		
01	04	2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum									1,307,387,500	1,307,387,500		
01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawai		Jumlah SDM TU Pimpinan, Administrasi Teknis Perkantoran dan Kepegawaian		Kab. Pangadaran, Parigi, Parigi		19 Orang		472,350,000	472,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga		Jumlah Fasilitas Operasional KDH/WKDH		Kab. Pangadaran, Parigi, Parigi		1 Tahu n		835,037,500	835,037,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	

01	04	2.02	Penataan Organisasi									876,477,100	451,842,850		
01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Uraian Tugas Lingkup Pemda Kabupaten Pangandaran	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi	11 Buah		359,460,000	128,127,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
					Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja pada setiap jabatan		9 Dokumen								
01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan OPD Jumlah Standar Operasional Prosedur	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi	1 Dokumen		210,003,800	156,303,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
					Jumlah Standar Operasional Prosedur		90 Peran gkat Daerah								
					Indek Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran		875 Buah								
01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi	2 Dokumen		307,013,300	167,411,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
01	04	2.03	Protokol dan Komunikasi Pimpinan									3,208,087,100	2,678,485,400		
01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Keprotokolan	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi	16 Kali		399,822,400	256,801,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/WKDH	Kab. Pangandara n, Parigi, Parigi	375 Kali		784,632,200	624,251,500	PENDAPA TAN ASLI DAERAH				
01	04	2.03	03	Pendokum entasian Tugas Pimpinan	Jumlah Informasi Kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang Disebarluaskan	Kab. Panga ndara n, Parigi, Parigi	5 Jenis		2,023,632,500	1,797,432,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									26,705,128,688	23,992,491,308		
01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									49,150,000	49,150,000		
01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi	4 Dokumen		49,150,000	49,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH				

01	01	2.02		Administrasi Keuangan								14,748,012,412	14,748,012,412		
01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai ASN	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		90 Orang			14,623,892,412	14,623,892,412	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	
01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		1 Dokumen			107,760,000	107,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah SDM Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)			3 Orang						
						Jumlah SDM Penyelenggaraan Pengelolaan Kepegawaian			1 Orang						
01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		2 Dokumen			8,180,000	8,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.02	09	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		1 Dokumen			8,180,000	8,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03		Administrasi Umum								11,565,756,276	8,853,118,896		
01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk/Keluar yang dikelola	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		3678 Buah			24,690,000	4,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		37 Rekening			513,534,500	513,534,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah SDM Pengemudi Non PNS	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		17 Orang			276,500,000	276,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah STNK			9 Unit						
01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah SDM Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		10 Orang			258,680,000	258,680,000	PEN DAPA TAN ASLI DAER AH	
01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		14 Oran g			463,767,258	463,767,258	PEN DAPA TAN ASLI DAER AH	
01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor	Kab. Pangandaran , Parigi, Parigi		1 Paket			195,357,690	194,637,568	PEN DAPA TAN ASLI DAER AH	

01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	1 Paket		120,439,175	120,439,175	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	37 Jenis		61,684,647	61,684,647	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Kebutuhan Sewa Gedung / Tempat / Lahan / Tenda / Sound System	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	1 Paket		1,757,913,976	1,454,550,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Komputer yang dibeli		1 Paket					
						Jumlah Tanah yang disewa		4 Lokasi					
01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	5 Orang		42,785,904	42,785,904	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Paket					
01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	1 Paket		85,896,000	85,896,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	12 Bulan		2,489,300,000	2,365,528,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	18	RapatRapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	12 Bulan		2,578,265,700	1,666,030,200	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkap an Rumah Jabatan/Di nas		Jumlah Perlengkap an Rumah Dinas yang Dibeli	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	1 Paket		181,793,607	0	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor		Jumlah Perlengkap an Gedung Kantor yang Dibeli	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	1 Paket		252,414,446	0	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Di nas		Jumlah Peralatan Rumah Dinas yang Dibeli	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	1 Paket		435,028,703	0	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	1 Paket		178,568,364	0	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	1 Paket		160,470,814	0	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	3 Bangunan		122,760,000	122,760,000	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Bangunan		339,751,584	339,751,584	PEN DAPATAN ASLI DAERAH	
						Jumlah Jasa Pengamanan Kantor		9 orang					

Antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di Bagian Pemerintahan terdapat perbedaan nomenklatur program. Dalam rancangan awal RKPD penyebutan adalah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sedangkan pada hasil Mapping dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah sedangkan pada hasil Mapping dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi Program Penetapan tanah Ulayat, Program Pengelolaan Ijin Membua Tanah dan Program Penatgunaan Tanah.
2. Di Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat terdapat perbedaan nomenklatur program. Dalam rancangan awal RKPD penyebutan pada Bagian Pemerintahan terdapat Program Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat semula Program Penataan Kesejahteraan Rakyat, Keagamaan, Sosial, Pendidikan dan Kesehatan , dan pada Bagian Hukum terdapat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Program RAN HAM hasil Mapping dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi menjadi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3. Di Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dalam rancangan awal RKPD Di Bagian Administrasi Pembangunan terdapat Program Pengendalian Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam semula Program Penataan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Potensi Daerah, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Program Perencanaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hasil Mapping menjadi Program Perekonomian dan Pembangunan.
4. Di Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Organisasi, dalam rancangan awal RKPD dibagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ada Program Penataan Keprotokolan dan Informasi Kegiatan KDH/WKDH, di bagian Organisasi ada Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah, dan Bagian Umum Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH hasil Mapping kebutuhan ditambahkan kegiatan pemelih menjadi Program Penataan Administrasi Umum.
5. Di bagian Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dalam rancangan awal RKPD penyebutan berdasarkan hasil Mapping menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintah.

6. Pagu Anggaran Sekretariat Daerah dalam rancangan awal RKPD sebesar Rp. 62,690,119,687.00 sedangkan dalam hasil analisis atau pada plafon Anggaran Sementara menjadi Rp. 46,123,892,412.00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bagian, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran relevansinya dengan visi pada RPJMD Kabupaten Pangandaran (Tahun 2016-2021) yaitu “..KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA..” serta yang diambil pada Misi angka 1 (satu) yaitu: “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, bersih dan melayani*”

Tujuan:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel”

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah dan kesejahteraan rakyat.
- b. Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah
- c. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Tahun 2021 Sekretariat Daerah dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah akan melaksanakan 8 program dan 18 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:

- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan kegiatan:
 - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Penetapan Tanah Ulayat dengan kegiatan:
 - a. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan kegiatan:
 - a. Penerbitan Izin Membuka Tanah.
- 4) Program Penatagunaan Tanah dengan kegiatan:
 - a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan :

- a. Administrasi Tata Pemerintahan;
Sub Kegiatan :
 - a) Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - b) Pengelolaan Administrasi Pemerintahan;
 - c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial;
 - c) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b) Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - c) Pedokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 - d. Fasilitasi Kerjasama Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
 - b) Asilitasi Kerjasama Luar Negeri;
 - c) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
- 6) Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan kegiatan :
- a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
 - b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;

- c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil;
 - d) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD;
 - e) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD.
 - b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
 - b) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
 - c) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
Sub Kegiatan :
 - a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
 - c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
- a. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Penataan Organisasi.
 - Sub Kegiatan :
 - a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - d) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- c. Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Keprotokolan;
 - b) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
 - c) Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- d. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- f. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- h. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b) Pemeliharaan Mebel;
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dalam Rencana Kerja 2021 Sekretariat Daerah Kab. Pangandaran terdiri dari program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten diimplementasikan terhadap 8 Program dan 18 Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, dengan anggaran sebesar Rp. 431,400,700.00, terdiri dari
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 431,400,700.00, terdiri dari :
 - ✓ Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota, dengan anggaran Rp. 431,400,700.00
2. Program Penetapan Tanah Ulayat, dengan anggaran sebesar Rp. 99,712,900, terdiri dari :

- a. Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 99,712,700, meliputi :
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 99,712,700.00
3. Program Penatagunaan Tanah, dengan anggaran sebesar Rp. 65,868,900.00, terdiri dari :
 - a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 65,868,900.00, meliputi :
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 65,868,900.00
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 33,542,746,210, terdiri dari :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 53,450,000, terdiri dari :
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan, dengan anggaran sebesar Rp. 53,450,000.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 13,592,563,572, terdiri dari :
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 13,592,563,572.
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 301,680,000,
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 92,780,000,

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 8,180,000.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 101,860,000, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - ✓ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 101,860,000.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2,075,660,310, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp. 342,210,000.
 - ✓ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp. 22,920,000.
- e. Kegiatan Administrasi Umum, dengan anggaran sebesar Rp. 2,075,660,310, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 61,664,942.
 - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 3,106,959,668,
 - ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 42,783,980,
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 209,335,000,
 - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 95,896,000,
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1,471,214,700,

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 6,663,827,250, terdiri dari Sub Kegiatan :
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 7,498,500,
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 512,334,500.
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1,454,550,000.
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 4,689,444,250.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1,152,300,000, terdiri dari Sub Kegiatan :
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 734,580,000;
 - ✓ Pemeliharaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp. 22,500,000.
 - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 395,220,000;
- h. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1,326,349,848, terdiri dari Sub Kegiatan :
- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 840,799,848;
 - ✓ Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 185,550,000;

- ✓ Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 300,000,000;
- i. Kegiatan Penataan Organisasi, dengan anggaran sebesar Rp. 2,117,685,750, terdiri dari :
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 642,692,000,
 - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dengan anggaran sebesar Rp. 757,946,000,
 - ✓ Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan anggaran sebesar Rp. 717,047,750.
- k. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan anggaran sebesar Rp. 2,779,085,500, terdiri dari :
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, dengan anggaran sebesar Rp. 356,801,500,
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan anggaran sebesar Rp. 624,251,500,
 - ✓ Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan anggaran sebesar Rp. 1,798,032,500.
- 5. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp. 19,620,189,125, terdiri dari :
 - a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp. 1,707,813,350, meliputi :
 - ✓ Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp. 1,707,813,350.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp. 16,722,925,575, terdiri dari :
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan anggaran sebesar Rp. 11,350,000,000;

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 1,518,167,498;
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp. 3,854,758,077.
- c. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 1,004,310,200, meliputi :
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan besar anggaran Rp. 297,207,000,
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 550,941,000,
 - ✓ Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 156,162, 200.
- d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 185,140,200, meliputi :
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan anggaran sebesar Rp. 185,140,200
6. Program Perekonomian Dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 4,661,922,566 terdiri dari :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 801,201,548,
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan anggaran sebesar Rp. 307,622,368,
 - ✓ Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan anggaran sebesar Rp. 493,579,268.

- b. Administrasi Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 2,117,056,268, terdiri dari :
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 869,851,268;
 - ✓ Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 1,247,205,000.
- c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp. 1,743,664,750, terdiri dari :
- ✓ Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp. 1,743,664,750

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran guna tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025 dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan oleh Bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) maka penetapan prioritas program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Pangandaran maupun OPD yang membidangi fungsi lain

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, dengan Rencana Kerja (Renja) pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memicu tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran tanpa mengabaikan kualitas kinerja, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Dalam rangka meningkatkan Kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan dalam kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Bagian di lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Pangandaran.

a.n. BUPATI PANGANDARAN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. KUSDIANA, MM